



## Application of the Value for Money Concept as a Performance Assessment Measure for Regency/City Governments in West Nusa Tenggara Province for the 2018-2022 Period

Fia Annisa Zharni<sup>1\*</sup>, Dyah Mieta Setyawati<sup>2</sup>  
Universitas Gunadarma

**Corresponding Author:** Fia Annisa Zharni [fiaannisa13@gmail.com](mailto:fiaannisa13@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Value For Money, Implementation of Autonomy, Effectiveness Ratio

*Received :* 19, September  
*Revised :* 21, October  
*Accepted:* 23, November

©2023 Zharni, Setyawati, Inizawati:  
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### ABSTRACT

The implementation of regional autonomy has logistical consequences in the form of the importance of effective and efficient financial management. This research aims to determine the financial performance of Regency/City governments in West Nusa Tenggara Province for the 2018-2022 period with the concept of value for money. Value for money is a management method that is based on three elements, namely economics, efficiency and effectiveness. The object of this research is a report on the realization of the regional income and expenditure budget for the 2018-2022 period. The results of this research show that the performance of Regency/City governments in West Nusa Tenggara Province For the 2018-2022 period based on economic and efficiency ratios has had good results. On the effectiveness ratio has less good results.

---

## Penerapan Konsep Value for Money sebagai Ukuran Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2022

Fia Annisa Zharni<sup>1\*</sup>, Dyah Mieta Setyawati<sup>2</sup>

Universitas Gunadarma

**Corresponding Author:** Fia Annisa Zharni [fiaannisa13@gmail.com](mailto:fiaannisa13@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Value For Money, Pelaksanaan Otonomi, Rasio Efektivitas

*Received :* 19, September

*Revised :* 21, October

*Accepted:* 23, November

©2023 Zharni, Setyawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi yang logis berupa pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018-2022 dengan konsep value for money. Value for money merupakan metode pengelolaan yang bedasar pada tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Objek dari penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2018-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018-2022 berdasarkan rasio ekonomis dan efisiensi memiliki hasil yang baik. Pada rasio efektivitas memiliki hasil yang kurang baik.

---

## PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik menjadikan kinerja sebagai perhatian utama dalam mencapai tujuan. Bastian (2017) menyatakan kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Menilai sukses atau tidaknya organisasi dalam mencapai suatu tujuan diperlukan penilaian kinerja. Hal ini berarti, kinerja mencerminkan pencapaian hasil atau prestasi kerja pada periode tertentu sesuai wewenang dan tanggung jawab organisasi tersebut. Penilaian kinerja, menurut Hindri (2014) merupakan faktor penting dalam organisasi sektor publik yang bertujuan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik dan tepat sasaran, dimana akuntabilitas tidak hanya kemampuan lembaga sektor publik menunjukkan bagaimana dana publik digunakan, tetapi meliputi kemampuan memberikan jaminan dari pengguna sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik

Menurut Hamid (2011) pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan sejak tahun 2001 hingga saat ini. Hal ini didasari oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang berisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya masing-masing. Polii, Saerang dan Tangkuman (2020) menyatakan pengukuran kinerja pemerintah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diukur menggunakan konsep *Value For Money*. *Value For Money* merupakan metode pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasar pada tiga elemen, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Rasio ekonomis menggambarkan kehematan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Rasio efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah memaksimalkan hasil dari penggunaan sumber daya. Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan antara hasil dan dampak dari penggunaan dana untuk menilai apakah pemerintah telah berhasil dalam mengelola sumber daya tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi konsep *Value For Money* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah agar memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu dari provinsi di Indonesia yang terletak dibagian timur yang termasuk dalam kepulauan Nusa Tenggara. Pusat pemerintahan dan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat berada di kota Mataram. Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai daerah otonomi dengan maksud untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang didasarkan atas kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya dan politik, luas daerah, jumlah penduduk, dan berbagai pertimbangan lainnya yang telah ditetapkan. Provinsi ini memiliki dua pulau besar diantaranya pulau Lombok dan pulau Sumbawa yang terdiri dari delapan kabupaten dan dua kota.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam jangka waktu lima tahun yaitu periode tahun 2018-2022 dengan mendasarkan pada hasil nilai ukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas menurut penerapan konsep *Value For Money*.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Akuntansi Pemerintahan**

Halim (2017) menyatakan bahwa akuntansi pemerintah merupakan sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah dan tindakan.

#### **Kinerja**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja merupakan keluaran atau hasil analisis dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur untuk menilai kinerja di masa lalu atau pada tahun sebelumnya sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas dan potensi-potensi kinerja yang berkelanjutan pada sebuah entitas. Menurut Indrayani (2018) kinerja merupakan suatu tingkat dalam pencapaian dari pelaksanaan/kegiatan program untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi atau perusahaan. Dengan demikian kinerja dapat mencerminkan hasil yang dicapai oleh seseorang atau organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan.

## Pengukuran Kinerja

Merupakan serangkaian tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan dimana hasil pengukuran digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana. Pendekatan pengukuran kinerja menurut Mahsun (2016) dapat menggunakan :

Pertama, Analisis Anggaran merupakan suatu teknik pengukuran yang berdasarkan kepada anggaran dan laporan realisasi anggaran dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya untuk memperoleh hasil selisih lebih (*favourable variance*) atau selisih kurang (*unfavourable variance*) yang berfokus pada kinerja masuk dan keluar dalam bentuk data finansial. Kedua, analisis Rasio Laporan Keuangan, merupakan suatu teknik pengukuran yang berdasarkan atas perhitungan rasio-rasio keuangan, misalnya rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar. Ketiga, *Balanced Scorecard Method*, merupakan teknik pengukuran yang berdasarkan pada aspek finansial dan non-finansial dengan menggunakan empat dimensi pengukuran kinerja dalam bentuk perspektif kinerja, yaitu perspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif bisnis internal dan perspektif pembelajaran. Keempat, pengukuran *Value for Money* merupakan suatu konsep perluasan ruang lingkup dari audit finansial yang berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Nilai ukuran ekonomi menunjukkan seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan, sedangkan nilai ukuran efisiensi menunjukkan seberapa besar cara yang digunakan untuk membandingkan input dengan output serta nilai ukuran efektifitas menunjukkan ketepatan organisasi dalam pencapaian target dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan realisasinya.

Afandi *et.al* (2022) menyebutkan bahwa penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi kemajuan suatu pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya sedangkan Mulyaningtyas (2018) menyebutkan bahwa Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Hal ini berarti, diperlukan informasi penggunaan sumber daya yang efisien dalam produksi barang dan jasa, kualitas barang dan jasa untuk membandingkan hasil proses dengan tujuan yang dimaksud dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik yaitu memperoleh dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## Value For Money

Konsep pengukuran *Value For Money* menurut Mardiasmo (2018) merupakan salah satu jembatan yang dapat mewujudkan tujuan tata kelola yang memadai antara pemerintah, perusahaan atau entitas dan masyarakat (*good governance*) dalam suatu organisasi sektor publik. Konsep pengukuran *Value For Money* menghendaki segala sumber daya publik digunakan dengan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Value for money dalam organisasi sektor publik diperlukan untuk memaksimalkan seluruh sumber daya digunakan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran dengan konsep serupa telah dilakukan oleh Rumagit, Karamoy dan Afandi (2022) dengan objek penelitian di Kota Manado.

## Rasio Ekonomis

Menurut Mahmudi (2016) konsep ekonomis menghendaki organisasi sektor publik tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional organisasi. Ekonomis memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh secara hemat yaitu dengan harga yang lebih rendah atau lebih murah dengan kualitas tertentu. Ekonomis merupakan perbandingan antara input dengan nilai rupiah (anggaran).

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

## Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2016) efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

## Rasio Efektivitas

Menurut Mahmudi (2016) efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektifitas membandingkan antara outcome dengan output.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

### Kriteria Penilaian Kinerja menurut Konsep *Value For Money*

Tabulasi nilai ukuran pada Tabel 2 ditujukan untuk mendapatkan hasil kinerja atas nilai ukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas menurut penerapan konsep *Value For Money* pada organisasi sektor publik.

**Tabel.1 Kriteria Penilaian Kinerja menurut Konsep *Value For Money***

Rasio Ekonomis	Keterangan	Rasio Efisiensi	Keterangan	Rasio Efektivitas	Keterangan
Jika < 100%	Ekonomis	Jika < 100%	Efisien	Jika < 100%	Tidak Efektif
Jika = 100%	Ekonomi Berimbang	Jika = 100%	Efisiensi Berimbang	Jika = 100%	Efektivitas Berimbang
Jika > 100%	Tidak Ekonomis	Jika > 100%	Tidak Efisien	Jika > 100%	Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327

## METODOLOGI

### Objek Penelitian

Pada penelitian ini, objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Konsep *Value For Money* Sebagai Ukuran Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan unit analisis penelitian adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dengan time series penelitian dalam jangka waktu lima tahun yaitu periode 2018-2022.

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2017) menyatakan metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017) adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018-2022 yang bersumber dan dipublikasikan oleh situs resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

### Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data ditujukan untuk memperoleh pemahaman dan mengetahui nilai kinerja keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui serangkaian prosedur seperti yang dinyatakan oleh Mashun (2016) untuk mendapatkan tiga jenis ukuran penilaian yang dihitung dengan menggunakan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas

dengan mengukur tingkat kinerja organisasi sektor publik dengan tingkat persentasi rasio seperti pada Tabel 2.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan selanjutnya dilakukan setelah melakukan perhitungan nilai rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dengan menggunakan konsep *value for money*. Tabel 2 berikut disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2018 - 2022.

**Tabel. 2 Hasil Penelitian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Konsep Value For Money Tahun 2018 - 2022**

Tahun	Ekonomis (%)	Kriteria	Efisiensi (%)	Kriteria	Efektifitas (%)	Kriteria
<b>Kabupaten Lombok Barat</b>						
2018	94,87	Ekonomis	99,40	Efisien	94,54	Tidak Efektif
2019	97,50	Ekonomis	97,61	Efisien	97,12	Tidak Efektif
2020	89,59	Ekonomis	105,70	Tidak Efisien	91,69	Tidak Efektif
2021	97,20	Ekonomis	97,20	Efisien	97,86	Tidak Efektif
2022	100,73	Ekonomis Berimbang	100,52	Efisien Berimbang	98,01	Tidak Efektif
<b>Kabupaten Lombok Tengah</b>						
2018	98,87	Ekonomis	102,64	Tidak Efisien	100,23	Efektif Berimbang
2019	98,33	Ekonomis	102,18	Tidak Efisien	99,81	Tidak Efektif
2020	90,14	Ekonomis	99,85	Efisien	91,30	Tidak Efektif
2021	96,30	Ekonomis	100,42	Efisien Berimbang	96,01	Tidak Efektif
2022	84,13	Ekonomis	95,82	Efisien	94,89	Tidak Efektif
<b>Kabupaten Lombok Timur</b>						
2018	96,39	Ekonomis	98,27	Efisien	97,88	Tidak Efektif
2019	99,66	Ekonomis	102,54	Tidak Efisien	98,14	Tidak Efektif
2020	92,83	Ekonomis	102,31	Tidak Efisien	92,93	Tidak Efektif

Tahun	Ekonomi (%)	Kriteria	Efisiensi (%)	Kriteria	Efektifitas (%)	Kriteria
2021	87,54	Ekonomis	99,83	Efisien	96,97	Tidak Efektif
2022	96,07	Ekonomis	109,60	Tidak Efisien	96,69	Tidak Efektif
Kabupaten Lombok Utara						
2018	90,76	Ekonomis	98,58	Efisien	94,45	Tidak Efektif
2019	93,89	Ekonomis	103,67	Tidak Efisien	92,82	Tidak Efektif
2020	80,70	Ekonomis	101,14	Tidak Efisien	82,55	Tidak Efektif
2021	92,88	Ekonomis	99,69	Efisien	93,23	Tidak Efektif
2022	101,00	Tidak Ekonomis	98,93	Efisien	101,70	Efektif
Kota Mataram						
2018	100,17	Ekonomis Berimbang	101,21	Tidak Efisien	100,45	Efektif Berimbang
2019	100,19	Ekonomis Berimbang	99,06	Efisien	103,34	Efektif
2020	95,59	Ekonomis	104,42	Tidak Efisien	92,81	Tidak Efektif
2021	95,92	Ekonomis	97,36	Efisien	99,92	Efektif Berimbang
2022	83,23	Ekonomis	148,65	Tidak Efisien	56,49	Tidak Efektif
Kabupaten Sumbawa						
2018	101,35	Tidak Ekonomis	104,96	Tidak Efisien	98,32	Tidak Efektif
2019	98,07	Ekonomis	102,91	Tidak Efisien	100,22	Efektif Berimbang
2020	86,67	Ekonomis	98,69	Efisien	91,00	Tidak Efektif
2021	99,75	Ekonomis	101,74	Tidak Efisien	98,22	Tidak Efektif
2022	88,44	Ekonomis	95,79	Efisien	93,37	Tidak Efektif
Kabupaten Dompu						
2018	96,95	Ekonomis	102,10	Tidak Efisien	98,97	Tidak Efektif

Tahun	Ekonomi (%)	Kriteria	Efisiensi (%)	Kriteria	Efektifitas (%)	Kriteria
2019	92,76	Ekonomis	98,54	Efisien	97,29	Tidak Efektif
2020	85,79	Ekonomis	101,04	Tidak Efisien	87,98	Tidak Efektif
2021	97,79	Ekonomis	98,13	Efisien	100,75	Efektif
2022	96,68	Ekonomis	94,04	Efisien	105,40	Efektif
<b>Kabupaten Bima</b>						
2018	97,73	Ekonomis	104,28	Tidak Efisien	98,01	Tidak Efektif
2019	96,26	Ekonomis	100,58	Efisien Berimbang	98,65	Tidak Efektif
2020	91,23	Ekonomis	100,57	Efisien Berimbang	92,24	Tidak Efektif
2021	94,97	Ekonomis	98,94	Efisien	97,25	Tidak Efektif
2022	94,77	Ekonomis	99,57	Efisien	96,78	Tidak Efektif
<b>Kabupaten Sumbawa Barat</b>						
2018	96,39	Ekonomis	111,44	Tidak Efisien	85,44	Tidak Efektif
2019	98,66	Ekonomis	105,48	Tidak Efisien	96,18	Tidak Efektif
2020	91,44	Ekonomis	103,18	Tidak Efisien	90,10	Tidak Efektif
2021	105,21	Tidak Ekonomis	95,23	Efisien	112,23	Efektif
2022	90,51	Ekonomis	79,90	Efisien	117,94	Efektif
<b>Kota Bima</b>						
2018	86,51	Ekonomis	111,05	Tidak Efisien	98,03	Tidak Efektif
2019	88,15	Ekonomis	102,82	Tidak Efisien	100,57	Efektif
2020	86,85	Ekonomis	111,36	Tidak Efisien	87,29	Tidak Efektif
2021	93,72	Ekonomis	98,22	Efisien	97,13	Tidak Efektif
2022	96,49	Ekonomis	92,97	Efisien	105,55	Efektif

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan Tabel 2 kinerja Kabupaten Lombok Barat dilihat dari pengukuran ekonomi selama lima periode menunjukkan penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin tinggi. Namun selama periode tersebut masih tergolong ekonomis. Kinerja pemerintah paling ekonomis terjadi pada tahun 2020. Dilihat dari pengukuran efisien selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan dengan tahun 2020. Kinerja pemerintah paling efisien terjadi pada tahun 2021. Kinerja Kabupaten Lombok Barat dilihat dari pengukuran efektifitas selama lima periode tergolong tidak efektif, namun dapat dikatakan kinerja pemerintah menunjukkan peningkatan karena persentase yang semakin meningkat. Kinerja pemerintah paling efektif terjadi pada tahun 2022.

Kinerja Kabupaten Lombok Tengah dilihat dari pengukuran ekonomi selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling ekonomis terjadi pada tahun 2022. Dilihat dari pengukuran efisien selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah pada tahun 2020-2022 dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Kinerja pemerintah paling efisien terjadi pada tahun 2022. Kinerja Kabupaten Lombok Tengah dilihat dari pengukuran efektifitas selama lima periode tergolong tidak efektif, Hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling efektif terjadi pada tahun 2018. Kinerja Kabupaten Lombok Timur dilihat dari pengukuran ekonomi selama lima periode menunjukkan penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin tinggi. Namun selama periode tersebut masih tergolong ekonomis. Kinerja pemerintah paling ekonomis terjadi pada tahun 2021. Dilihat dari pengukuran efisien selama lima periode menunjukkan penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin tinggi. Kinerja pemerintah paling efisien terjadi pada tahun 2018. Kinerja Kabupaten Lombok Timur dilihat dari pengukuran efektifitas selama lima periode tergolong tidak efektif, Hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling efektif terjadi pada tahun 2019.

Kinerja Kabupaten Lombok Utara dilihat dari pengukuran ekonomi selama lima periode menunjukkan penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin tinggi. Kinerja pemerintah paling ekonomis terjadi pada tahun 2020. Dilihat dari pengukuran efisien selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Kinerja pemerintah paling efisien terjadi pada tahun 2018. Kinerja Kabupaten Lombok Utara dilihat dari pengukuran efektifitas selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin tinggi. Kinerja pemerintah paling efektif terjadi pada tahun 2022.

Kinerja Kota Mataram dilihat dari pengukuran ekonomi selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling ekonomis terjadi pada tahun 2022. Dilihat dari pengukuran efisien selama lima periode menunjukkan penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin tinggi. Kinerja pemerintah paling efisien terjadi pada tahun 2021. Kinerja Kota Mataram dilihat dari pengukuran efektifitas selama lima periode menunjukkan penurunan, Hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling efektif terjadi pada tahun 2019. Kinerja Kabupaten Sumbawa dilihat dari pengukuran ekonomi selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling ekonomis terjadi pada tahun 2020. Dilihat dari pengukuran efisien selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Kinerja pemerintah paling efisien terjadi pada tahun 2022. Kinerja Kabupaten Sumbawa dilihat dari pengukuran efektifitas selama lima periode menunjukkan penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling efektif terjadi pada tahun 2019.

Kinerja Kabupaten Dompu dilihat dari pengukuran ekonomi selama lima periode menunjukkan penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin tinggi. Namun selama periode tersebut masih tergolong ekonomis. Kinerja pemerintah paling ekonomis terjadi pada tahun 2020. Dilihat dari pengukuran efisien selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling efisien terjadi pada tahun 2022. Kinerja Kabupaten Dompu dilihat dari pengukuran efektifitas selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin tinggi. Kinerja pemerintah paling efektif terjadi pada tahun 2022. Kinerja Kabupaten Bima dilihat dari pengukuran ekonomi selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling ekonomis terjadi pada tahun 2020. Dilihat dari pengukuran efisien selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling efisien terjadi pada tahun 2021. Kinerja Kabupaten Bima dilihat dari pengukuran efektifitas selama lima periode menunjukkan penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling efektif terjadi pada tahun 2019.

Kinerja Kabupaten Sumbawa Barat dilihat dari pengukuran ekonomi selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling ekonomis terjadi pada tahun 2022. Dilihat dari pengukuran efisien selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling efisien terjadi pada tahun 2022. Kinerja Kabupaten Sumbawa Barat dilihat dari pengukuran efektifitas selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin tinggi. Kinerja pemerintah paling efektif terjadi pada tahun 2022. Kinerja Kota Bima dilihat dari pengukuran ekonomi selama lima periode menunjukkan penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin tinggi. Kinerja pemerintah paling ekonomis terjadi pada tahun 2018. Dilihat dari pengukuran efisien selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin rendah. Kinerja pemerintah paling efisien terjadi pada tahun 2022. Kinerja Kota Bima dilihat dari pengukuran efektifitas selama lima periode menunjukkan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang semakin tinggi. Kinerja pemerintah paling efektif terjadi pada tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa, persentase tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2018-2022 berfluktuasi. Hal ini berarti, hasil perhitungan rasio ekonomis, efisiensi, dan efektifitas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk pengukuran ekonomis menunjukkan hasil yang baik, karena rata-rata berada pada kriteria ekonomis yang berarti pemerintah mampu mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi pemborosan. Pada pengukuran efisiensi berada pada kriteria efisiensi dan tidak efisiensi. Tidak efisiensi terjadi karena pemerintah belum mampu memaksimalkan hasil dari penggunaan sumber daya. Pada pengukuran efektifitas menunjukkan hasil yang tidak baik, karena rata-rata berada pada kriteria tidak efektif yang berarti pemerintah belum berhasil memperoleh pendapatan yang lebih besar dari biaya yang dianggarkan.

### **Perbandingan Nilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Berdasarkan hasil penilai kinerja pada Tabel 1 tersebut, dapat menjadi sumber data pengukuran nilai kinerja antar Kabutan/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengukuran kinerja menurut penerapan konsep *Value For Money* didapatkan hasil bahwa nilai rasio ekonomis pemerintah daerah Pemerintah Daerah Provinsi NTB dengan nilai kinerja paling ekonomis selama periode 2018-2022 adalah berturut turut ditunjukkan oleh Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima menunjukkan hasil nilai kinerja dibawah nilai kinerja ekonomis Kabupaten Lombok Tengah dan urutan berikutnya adalah Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara.

Hasil ukuran penilaian kinerja menurut nilai rasio efisiensi pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB berturut-turut dengan nilai kinerja paling efisien selama periode 2018-2022 yaitu Kabupaten Sumbawa Barat sedangkan Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Mataram menunjukkan hasil nilai kinerja dibawah nilai kinerja efisien. Hasil ukuran penilaian kinerja menurut nilai rasio efektifitas pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB berturut-turut dengan nilai kinerja paling efisien selama periode 2018-2022 yaitu Kabupaten Sumbawa Barat sedangkan Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Utara, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram menunjukkan hasil nilai kinerja dibawah nilai kinerja efektifitas

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditujukan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam jangka waktu lima tahun yaitu periode tahun 2018-2022 dengan mendasarkan pada hasil nilai ukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas menurut penerapan konsep *Value For Money*, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: Hasil penilaian kinerja berdasarkan pada nilai rasio ekonomis pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kinerja paling ekonomis yaitu Kabupaten Lombok Tengah, urutan kedua selanjutnya adalah Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat, dan terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.

Hasil penilaian kinerja berdasarkan pada nilai rasio efisien pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kinerja paling efisien yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, urutan kedua selanjutnya adalah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan terendah adalah Kota Mataram. Hasil penilaian kinerja berdasarkan pada nilai rasio efektivitas pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kinerja paling efektif yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, urutan kedua selanjutnya adalah Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Utara, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Tengah, dan terendah adalah Kota Mataram.

Gulo dan Setyawati (2023) pada penelitiannya menyebutkan bahwa Laporan Keuangan perusahaan sangat penting untuk disajikan sesuai standar yang telah ditentukan. Perusahaan sebaiknya tidak melakukan tindakan manipulasi pada laporan keuangannya terutama perusahaan yang memiliki tanggung jawab publik yang besar. Berdasarkan hal ini, rekomendasi penelitian yang ditujukan pada Organisasi Sektor Publik adalah hal yang serupa, bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah organisasi sektor publik sangat penting untuk disajikan kepada publik sebagai bagian dari penerapan *good corporat governance* yang selanjutnya memberikan dampak keterlibatan positif dari pemerintah untuk memberikan tata kelola yang baik, perusahaan atau organisasi sektor publik untuk memberikan etika bisnis yang memadai dan masyarakat sebagai kontrol sosial. Oleh karena hal tersebut, sebaiknya organisasi sektor publik sebagai pelaku otonomi daerah pada Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat meningkatkan kinerja dengan berdasarkan pada payung kebijakan organisasi sektor publik yang menaunginya.

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Penerapan Konsep Value for Money sebagai Ukuran Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2022

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, Pandi. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia; Teori, Konsep Dan Indikator, Edisi I. Ed. Zanafa. Pekanbaru.
- Bastian, I. (2017). Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2017). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, A. (2011). Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik. Journal Academica.
- Hindri. (2014). Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Pusat di Indonesia. <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/19817-evaluasi-sistem-pengukuran-kinerja-pemerintah-pusat-di-Indonesia>.
- Indrayani. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus pada DPKAD Kota Lhokseumawe periode 2014-2016). Jurnal Akuntansi dan Keuangan.
- Gulo, W., dan D.M.Setyawati (2023). Analysis of Earning Manipulation Shenanigans in The Financial Statements of PT Garuda Indonesia TBK for The 2017-2021 Period. Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Vol.2, No.5, 2023: 859-874
- Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Anggota IKAPI.

- Mashun. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI.
- Mulyaningtyas. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto Dengan Pendekatan Value For Money ; PRIVE, Jurnal Riset-Akuntansi dan Keuangan , 1(1), ISSN: 2615-7306
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Polii, I. R., Saerang, D. P., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(4)
- Rumagit, I. B., Karamoy, H., & Afandi, D. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 17(1), 13-22.
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di Indonesia.